

Peran Manajemen Kurikulum dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

*Annisa Zubaedah, Risbon Sianturi, Arinal Adla

Universitas Pendidikan Indonesia

*Corresponding author: annisazbdh@upi.edu

Submitted/ Received 19 Oktober 2024; First Revised 27 November 2024; Accepted 28 November 2024; First Available Online 28 November 2024; Publication Date 01 Desember 2024

Abstract

Education in Indonesia experienced a significant transformation with the introduction of the Independent Curriculum, which aims to provide flexibility in the learning process. This research was conducted with the aim of analyzing the role of Curriculum Management in the Implementation of the Independent Campus Learning Policy. Using a qualitative approach, this research involved interviews and observations. The research results show that effective curriculum management is important to support the Merdeka Belajar policy, including flexible curriculum development, student curriculum development, and collaboration with industry. These findings suggest the need to train faculty and improve educational institutions to increase the effectiveness of these policies.

Keywords: Management role; Policy implementation; Freedom of Learning Independent Campus.

Abstrak

Pendidikan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dengan diperkenalkannya Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Peran Manajemen Kurikulum dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum yang efektif penting untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar, termasuk pengembangan kurikulum yang fleksibel, pengembangan kurikulum siswa, dan kolaborasi dengan industri. Temuan ini menunjukkan perlunya melatih fakultas dan meningkatkan institusi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Kata Kunci: Peran manajemen; Implementasi kebijakan; Merdeka belajar kampus merdeka.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dengan diperkenalkannya Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran (Lestari, D. E. 2024). Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengadaptasi pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik siswa (Pare, A., & Sihotang, H. 2023). Dalam konteks ini, peran manajemen kurikulum menjadi

sangat krusial untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan interaktif dalam pembelajaran, memungkinkan sekolah untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik. Menurut Devi et al. (2024), fleksibilitas yang diberikan oleh Kurikulum Merdeka

memungkinkan sekolah untuk mengembangkan potensi maksimal setiap siswa, dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan staf pengelola pendidikan sebagai partisipan utama dalam proses tersebut. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru yang kurang memadai tetap menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Menurut Mardhiyah et al. (2024), kepemimpinan kepala sekolah yang efektif berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen yang baik tidak hanya melibatkan perencanaan dan pengorganisasian, tetapi juga kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi semua pemangku kepentingan dalam proses pendidikan. Dukungan dari orang tua dan masyarakat juga dianggap penting dalam memfasilitasi penerimaan nilai-nilai lokal dalam kurikulum.

Lebih lanjut, Yansah et al. (2023) menekankan bahwa partisipasi aktif guru dalam perencanaan kurikulum adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru perlu memiliki kebebasan untuk menyesuaikan materi ajar dengan minat dan potensi siswa, sehingga mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan menarik.

Berdasarkan penelitian terbaru, penerapan Kurikulum Merdeka di beberapa sekolah menunjukkan hasil yang positif. Di SMAN 1 Sukanagara, misalnya, penerapan kurikulum ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan materi ajar dengan karakteristik siswa, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka mengalami peningkatan signifikan dalam keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar.

Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan sumber daya, seperti pelatihan guru yang kurang memadai dan infrastruktur yang terbatas, menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan

keberhasilan dan keberlanjutan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

Dalam konteks ini, manajemen pendidikan harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inovatif. Menurut Indriani (2022), manajemen pendidikan yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada perubahan struktural tetapi juga pada dukungan kuat dari semua pihak terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan bagaimana manajemen kurikulum berperan dalam implementasi kebijakan MBKM. Data dikumpulkan melalui survei kepada dua kelompok utama: provider (dosen dan tenaga kependidikan) dan user (mahasiswa).

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan rekomendasi terkait manajemen kurikulum dalam konteks MBKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Keterlibatan Provider**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar dosen memahami kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan terlibat aktif dalam proses perencanaan kurikulum. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teori dan praktik di lapangan. Dalam konteks ini, keterlibatan provider—dalam hal ini, dosen dan tenaga kependidikan—merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan MBKM.

Dari hasil survei, sekitar 93% responden dari kalangan pendidik dan tenaga kependidikan mengaku telah mengetahui tentang kebijakan MBKM. Angka ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan provider, jauh di atas rata-rata universitas yang hanya mencapai 66%. Kesadaran ini penting karena pemahaman

yang baik tentang kebijakan akan mempengaruhi cara mereka merancang dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip MBKM.

Namun, meskipun pemahaman tentang kebijakan sudah cukup baik, tantangan muncul ketika menyangkut penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari. Banyak dosen yang merasa kesulitan untuk mengintegrasikan elemen-elemen MBKM ke dalam kurikulum yang ada. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau sumber daya yang memadai untuk mendukung perubahan ini. Menurut Hernawan et al. (2022), meskipun provider terlibat aktif dalam diskusi dan sosialisasi mengenai MBKM, masih ada gap antara pengetahuan teoritis dan aplikasi praktis di lapangan.

Pengalaman Belajar Mahasiswa

Dari perspektif mahasiswa sebagai pengguna (user), hasil wawancara menunjukkan bahwa pembelajaran di luar kampus yang difasilitasi oleh kebijakan MBKM berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan perluasan wawasan mereka. Sebagian besar mahasiswa menilai bahwa kegiatan MBKM relevan dengan kebutuhan mereka sebagai calon lulusan yang siap menghadapi dunia kerja. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam implementasi, manfaat dari pengalaman belajar yang diperoleh melalui program MBKM sangat dirasakan oleh mahasiswa.

Mahasiswa juga melaporkan peningkatan dalam keterampilan interpersonal dan kemampuan beradaptasi, yang merupakan bagian dari soft skills yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Menurut Bloom (1956), pengukuran efektivitas pendidikan harus mencakup seberapa baik lulusan dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Dalam hal ini, MBKM memberikan platform bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan tersebut melalui pengalaman langsung.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun terdapat banyak aspek positif dari implementasi kebijakan MBKM, survei juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi. Pertama,

revisi kurikulum menjadi salah satu hambatan signifikan. Proses penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan prinsip-prinsip MBKM memerlukan waktu dan kolaborasi antara berbagai pihak di perguruan tinggi. Hal ini seringkali terhambat oleh birokrasi internal dan ketidakpastian mengenai standar yang harus dipenuhi.

Kedua, masalah sistem informasi akademik juga menjadi kendala. Banyak perguruan tinggi belum memiliki sistem informasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan MBKM secara efektif. Sistem informasi yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan kesulitan dalam pelacakan dan pengakuan kredit dari kegiatan belajar di luar kampus.

Ketiga, masalah pendanaan juga menjadi isu penting. Banyak mahasiswa menghadapi kesulitan finansial untuk mengikuti program-program MBKM seperti magang atau pertukaran mahasiswa, yang seringkali memerlukan biaya tambahan. Oleh karena itu, dukungan finansial dari perguruan tinggi atau pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan aksesibilitas program-program ini bagi semua mahasiswa.

Rekomendasi untuk Implementasi Kebijakan MBKM

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tiga rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini adalah pelatihan bagi dosen, peningkatan komunikasi antara pihak universitas dan mahasiswa, serta pengembangan sistem informasi akademik yang lebih baik. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai masing-masing rekomendasi tersebut.

Pelatihan bagi Dosen

Pelatihan bagi dosen merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM secara efektif (Sintiawati, N., dkk. 2022). Dosen sebagai provider pendidikan memiliki peran sentral dalam merancang dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip MBKM (Yudatama, U., dkk. 2023). Oleh karena itu, pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dosen

memahami tidak hanya teori di balik kebijakan ini, tetapi juga praktik terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelatihan ini seharusnya mencakup berbagai aspek, seperti:

- **Metodologi Pengajaran:** Dosen perlu dilatih dalam metodologi pengajaran yang mendukung pembelajaran aktif dan partisipatif, seperti pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan pembelajaran kolaboratif (Vahlepi, S., dkk. 2021)
- **Penggunaan Teknologi:** Dengan kemajuan teknologi, dosen harus mampu memanfaatkan alat-alat digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan hybrid, serta mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran (Munir, M., & Su'ada, I. 2024).
- **Evaluasi dan Penilaian:** Pelatihan tentang cara mengevaluasi hasil belajar mahasiswa secara objektif dan komprehensif juga penting, agar dosen dapat memberikan umpan balik yang konstruktif (Qurtubi, A., dkk. 2023).

Menurut Hernawan et al. (2022), pelatihan yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman dosen tentang kebijakan MBKM tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keterampilan hard dan soft skills mahasiswa. Dengan demikian, investasi dalam pelatihan bagi dosen akan berdampak positif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Peningkatan Komunikasi

Peningkatan komunikasi antara pihak universitas dan mahasiswa adalah aspek lain yang sangat penting dalam implementasi MBKM. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi dan memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan serta manfaat dari kebijakan ini (Laksmi, D. A. V. 2024). Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat komunikasi ini meliputi:

- **Sosialisasi Kebijakan:** Universitas harus secara aktif melakukan sosialisasi mengenai kebijakan MBKM kepada mahasiswa melalui seminar, workshop, atau forum diskusi. Hal ini akan membantu mahasiswa memahami bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam program-program MBKM.

- **Platform Umpan Balik:** Membangun platform di mana mahasiswa dapat memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka dengan program MBKM sangat penting. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki program di masa mendatang.
- **Keterlibatan Mahasiswa dalam Pengambilan Keputusan:** Melibatkan mahasiswa dalam proses perencanaan kurikulum dan kegiatan MBKM akan meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap program tersebut. Ini juga akan memberikan perspektif baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh pihak universitas.

Dengan memperkuat komunikasi antara universitas dan mahasiswa, diharapkan akan tercipta lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.

Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi akademik yang lebih baik adalah langkah penting lainnya untuk mendukung implementasi MBKM. Sistem informasi yang efisien akan memudahkan pengelolaan data akademik, termasuk pencatatan kegiatan belajar di luar kampus, pengakuan kredit dari kegiatan MBKM, serta monitoring kemajuan mahasiswa (Msra, R., & Santie, Y. D. 2023). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi ini meliputi:

- **Integrasi Data:** Sistem informasi harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, sehingga memudahkan akses informasi bagi dosen dan mahasiswa. Ini termasuk data terkait kegiatan magang, proyek penelitian, atau pertukaran mahasiswa.
- **User-Friendly Interface:** Antarmuka sistem harus dirancang agar mudah digunakan oleh semua pengguna—baik dosen maupun mahasiswa—agar mereka dapat dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan.
- **Fasilitas Pelaporan:** Sistem harus menyediakan fasilitas pelaporan yang memungkinkan dosen untuk melacak kemajuan mahasiswa dan memberikan umpan balik secara real-time.

KESIMPULAN

Pertama, keterlibatan provider, yaitu dosen dan tenaga kependidikan, menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai kebijakan MBKM. Sebagian besar dosen aktif terlibat dalam proses perencanaan kurikulum, yang menjadi langkah awal untuk memastikan keberhasilan implementasi. Namun, meskipun pemahaman ini ada, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dosen memiliki pengetahuan tentang kebijakan, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip MBKM dalam pengajaran sehari-hari masih perlu diatasi. Kedua, pengalaman belajar mahasiswa sebagai pengguna juga menunjukkan dampak positif dari kebijakan MBKM. Mahasiswa melaporkan bahwa pembelajaran di luar kampus meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan mereka. Ini menunjukkan bahwa program-program MBKM relevan dengan kebutuhan mereka sebagai calon lulusan yang siap menghadapi dunia kerja. Namun, tantangan seperti revisi kurikulum, pengembangan sistem informasi akademik, dan masalah pendanaan bagi mahasiswa tetap menjadi hambatan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Ketiga, rekomendasi untuk meningkatkan implementasi MBKM mencakup pelatihan bagi dosen untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip MBKM. Selain itu, peningkatan komunikasi antara pihak universitas dan mahasiswa sangat penting untuk mengurangi kesenjangan informasi dan memastikan semua pihak memahami tujuan serta manfaat kebijakan ini. Terakhir, pengembangan sistem informasi akademik yang lebih baik akan memudahkan pengelolaan data akademik dan mendukung pelaksanaan program MBKM secara lebih efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih kepada Bapak H. Dr. Risbon Sianturi.,SE.,M.Ap yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan pengetahuan yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi, L., & Mardhiyah, N. (2024). Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(4), 788-793. DOI: 10.1234/jtpp.v1i4.197.
- Hernawan, D., Seran, G. G., Purnamasari, I., Purnomo, A. M., & Apriliani, A. (2022). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Governansi*, 8(1), 1-10.
- Indriani, S. (2022). Manajemen Pendidikan dalam Era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 102-115.
- LAKSMI, D. A. V. (2024). Penerapan pendekatan hukum dalam inovasi pembelajaran terhadap implementasi kurikulum hukum di perguruan tinggi. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 53-61.
- Lestari, D. E. (2024). Studi komparasi pelaksanaan pembelajaran matematika pada kurikulum merdeka dengan kurikulum jepang. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 40-46.
- Mesra, R., & Santie, Y. D. (2023). Manajemen Pendidikan.
- Munir, M., & Su'ada, I. Z. (2024). Manajemen pendidikan Islam di era digital: Transformasi dan tantangan implementasi teknologi pendidikan. *JIEM: Journal Of Islamic Education and Management*, 5(1), 1-13.
- Pare, A., & Sihotang, H. (2023). Pendidikan Holistik untuk Mengembangkan Keterampilan Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27778-27787.
- Qurtubi, A., Rukiyanto, B. A., Rusmayani, N. G. A. L., Hita, I. P. A. D., Nurzaima, N., & Ismaya, R. (2023). Pengembangan Metode Penilaian Kinerja Guru Berbasis Kompetensi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3051-3061.
- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022). Partisipasi civitas akademik dalam

implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902-915.

Vahlepi, S., Helty, H., & Tersta, F. W. (2021). Implementasi model pembelaaran berbasis case method dan project based learning dalam rangka mengakomodir higher order thinking skill mahasiswa dalam mata kuliah psikologi pendidikan bahasa arab di masa pandemi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10153-10159.

Yansah, M., & Devi, L. (2023). Dukungan Orang Tua dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 6(2), 75-89.

Yudatama, U., Syamsiyah, N., Wiranata, A. D., Kom, R. I. S., Kom, M., Ma'sum, H., ... & Widiastuti, Y. (2023). *Memahami Teknologi Informasi: Prinsip, Pengembangan, dan Penerapan*. Kaizen Media Publishing.